

RINGKASAN DISERTASI

**BIOGRAFI POLITIK PAKU BUWANA X:
Studi Gerakan Islam dan Kebangsaan
di Keraton Surakarta**



Oleh:

**Drs. Hermanu Joebagio, M.Pd.
NIM. 06.3.497-BR**

Promotor:

**Prof. Dr. Husain Haikal, MA.
Prof. Dr. H. Machasin, MA.**

**PROGRAM PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**



TIM PENGUJI

1. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah
(Ketua Sidang)
2. Dr. H. Sukamto, M.A.
(Sekretaris Sidang)
3. Prof. Dr. Husain Haikal, M.A.
(Promotor/Anggota Penguji)
4. Prof. Dr. H. Machasin, M.A.
(Promotor/Anggota Penguji)
5. Dr. H. Abdurrahman
(Anggota Penguji)
6. Prof. Dr. H. Abdurrahman Assegaf, M.A.
(Anggota Penguji)
7. Prof. Dr. H. Djoko Suryo
(Anggota Penguji)
8. Prof. Dr. H. Abd. Munir Mulkan, S.U.
(Anggota Penguji)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan gerakan Islam dan kebangsaan di Keraton Surakarta. Permasalahan penelitian meliputi: (1) alasan-alasan yang mendorong Paku Buwana (PB) X melakukan gerakan Islam dan kebangsaan; (2) hubungan antar gerakan politik PB X, tumbuhnya pendidikan Islam di keraton, dan pergerakan kebangsaan di Surakarta; serta (3) reaksi Belanda terhadap gerakan politik yang dilakukan PB X. Persoalan ini penting untuk menjelaskan gerakan Islam di keraton didukung oleh elit agama dan pengusaha Muslim Laweyan. Sinergi antar mereka mendorong tumbuhnya 'politik lokal' di Surakarta

Metode yang digunakan adalah metode sejarah meliputi heuristik, kritik ekstern dan intern, interpretasi, perumusan fakta, dan penyajian pemikiran dalam penulisan sejarah. Sumber yang digunakan adalah sumber primer dan sekunder, sedangkan proses rekonstruksi mempertimbangkan segi diakronik (kesinambungan) dan sinkronik (perubahan). Pendekatan teori yang digunakan adalah teori partisipasi yang berfungsi memacu interaksi antar warga masyarakat (*civic engagement*) dan memacu keterlibatan warga masyarakat dalam bidang politik (*political engagement*). Dua aspek tersebut dipandang sebagai usaha meraih kesepadan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan politik yang dilancarkan PB X adalah reaksi terhadap *korte verklaring* 1893, kebijakan politik etis, dan Undang-Undang Desentralisasi 1903. Gerakan yang dilancarkan PB X dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu bidang pendidikan dan pemberdayaan. Madrasah (1905) dan sekolah umum (1914) merupakan usaha Sunan untuk memperkuat intelektualitas dan memacu tumbuhnya identitas Islam. Intelektualitas dan identitas adalah faktor struktur peluang politik. Sementara itu pendirian Bank Bondoloemakso, pasar, jalan dan

jembatan, Rumah Sakit Kadipolo, Rumah Singgah Wangkoeng untuk buruh migran, ruang untuk diskusi (Paheman Radya Pustaka) dan hiburan (Kebon Rodjo) merupakan faktor struktur peluang ekonomi. Kedua struktur peluang (politik dan ekonomi) memacu bangkitnya gerakan Islam dan kebangsaan di Surakarta. Dukungan PB X terhadap Sarekat Islam (SI) dan Boedi Oetomo (BO) yang dikampanyekan melalui perjalanan *incognito* memacu jumlah anggota SI berlipat ganda. Dukungan politik mengindikasikan telah terjadi perubahan paradigma politik di keraton, yakni dari perspektif politik tradisional menuju politik partisipasi massa. Tindakan Sunan berseberangan dengan politik *beamtenstaat* yang diberlakukan Belanda. Kebijakan di atas tidak dilanjutkan oleh PB XI dan PB XII.

Sumbangan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa gerakan kebangsaan adalah peran seluruh komponen bangsa, baik yang berpandangan non-kooperatif maupun kooperatif. Meskipun gerakan di keraton bersifat kooperatif, tetapi dinamika politik mendukung gerakan non-kooperatif, sehingga mereka pendukung perjuangan kemerdekaan.

RINGKASAN DISERTASI

**Judul : BIOGRAFI POLITIK PAKU BUWANA X:
Studi Gerakan Islam dan Kebangsaan di Keraton
Surakarta**

Nama : Drs. Hermanu Joebagio, M.Pd.

NIM : 06.3.497-BR

Landasan penulisan disertasi Biografi Politik Susuhunan (Sunan) Paku Buwana X tidak hanya dilihat dari segi tindakan politik yang dilakukan pada tahun 1900 hingga 1939, tetapi perlu menganalisis pemikiran Sunan mengenai kekisruhan politik pada masa penguasa sebelumnya. Melalui dua aspek itu dapat direkonstruksi tindakan yang berkaitan dengan gerakan Islam dan kebangsaan. Inti rekonstruksi Biografi Politik Paku Buwana terletak pada kesadarannya terhadap: (1) kegagalan penguasa sebelumnya dalam membangun politik kenegaraan, (2) tindakan menghadapi tekanan kolonial dan tantangan pemberdayaan diri, (3) membangun gerakan Islam dan kebangsaan di Keraton Surakarta, dan (4) konstruksi reaksi Belanda terhadap perubahan politik di Keraton Surakarta.

I. Kegagalan Membangun Politik Kenegaraan

Hampir seluruh kerajaan tradisional di Nusantara gagal meletakkan landasan kehidupan politik kerajaan. Kegagalan ini menjadi bahan renungan PB X, yang terklasifikasi dalam tiga pokok persoalan, yakni: (1) Sistem politik yang dianut yang tidak mengakomodasi potensi-potensi kelompok sosial dan kelompok politik. (2) Kejenuhan politik perkawinan yang menumbuhkan kerumitan jaringan hubungan keluarga dan jaringan kepentingan politik. (3) Diberlakukannya birokrasi modern *binnenlandsbestuur* dan *inlandschbestuur* yang mengakibatkan terputusnya jaringan loyalitas

antara para bupati di pesisir dan mancanegara terhadap kekuasaan raja.

A. Sistem Politik di Keraton Surakarta

Pada dasarnya, sistem politik yang dianut di Keraton Surakarta mengikuti pola Sultan Agung, yakni keratin sebagai agen islamisasi di Jawa, dan Islam adalah wadah rekonsiliasi budaya Jawa. Dua kebijakan itu bermakna: (1) keraton adalah pusat pengkajian ilmu agama Islam. Melalui kebijakan ini berakibat munculnya dukungan ulama kepada raja sebagai wujud hidup berdampingan. (2) Islam merupakan alat politik untuk mengatasi persoalan-persoalan sosio-budaya dan sosio-ekonomi yang sedang dihadapi raja. Dengan landasan ini dia berharap mendapat legitimasi politik dari basis massa yang lebih luas. (3) Islam yang dianut bercorak mistik atau sinkretik, sehingga Islamisasi di pedalaman Jawa bercorak sama. Hal ini konsekuensi dari masih bertahannya tradisi Hindu-Buddha.

Dengan landasan di atas, maka kelompok sosial yang mampu memasuki ranah politik hanya kelompok yang dekat dengan istana, yakni: aristokrat, ulama dan pujangga. Sementara itu pelaku ekonomi ditempatkan pada posisi peripheral. Dalam kasus 'premulung', yakni ketika PB II melarikan diri ke Ponorogo dan tertahan di 'Premulung', dia berinisiatif meminta bantuan alat transportasi 'kuda' kepada pengusaha Laweyan. Permintaan raja cenderung 'diacuhkan'. Gejala ini menunjukkan adanya apatisisme 'Muslim' terhadap penguasa. Keteracuhan kelompok sosial itu konsekuensi dari:

- (1) Tiadanya perhatian raja terhadap pelaku ekonomi, yang pada dasarnya mempunyai andil besar dalam membangun perekonomian negara, dan menjaga stabilitas politik serta keamanan negara. Menurut Arbi Sanit terwujudnya stabilitas politik ditentukan oleh variabel yang saling berkaitan, yaitu; (a)

pembangunan ekonomi, (b) adanya lembaga politik yang mengakomodasi seluruh kepentingan warga masyarakat, dan (c) dukungan elit politik maupun rakyat. Kenyataan menunjukkan bahwa pelaku ekonomi tidak terakomodasi dalam sistem politik kerajaan. Seluruh aspek kekuasaan (budaya, ekonomi, politik, dan sosial) tersentralisasi di tangan penguasa. Raja ataupun bupati secara simbolik tidak membutuhkan kelompok social pelaku ekonomi, karena mereka tidak memiliki basis massa. Sebaliknya pada awal abad XX pelaku ekonomi (pengusaha Laweyan) dan golongan intelektual menjadi motor penggerak gerakan kebangsaan. Peran tersebut muncul akibat meluasnya peminggiran dan diskriminasi yang mereka hadapi, sehingga memacu kesadaran organik. Dengan bekal jejaring ekonomi dan jejaring dengan kaum intelektual, maka gerakan politik yang dibentuk makin meluas, beragam dan fungsional.

- (2) Doktrin Islam yang dipahami masyarakat (termasuk pelaku ekonomi) bahwa birokrat dan rakyat berkedudukan sejajar, namun kenyataan sosial menunjukkan terjaganya pelapisan-pelapisan sosial yang diskriminatif.

B. Jenuhnya Jaringan Hubungan Keluarga

Politik perkawinan merupakan alat untuk menyatukan aristokrat dalam satu lingkup keluarga besar. Politik perkawinan antar keluarga tidak terbatas antar pejabat negara baik di pusat maupun di daerah, tetapi juga perkawinan antara keluarga pejabat dan pemberontak, bahkan dengan keluarga ulama yang bertindak sebagai oposisi. Politik perkawinan adalah strategi penguasa untuk meredam gejolak politik atau mendamaikan antar faksi yang sudah lama mengalami keretakan. Mengingat politik perkawinan menghasilkan kearistokratan yang bertingkat dan berlapis-lapis, maka mengakibatkan kejenuhan. Kejenuhan itu berpeluang disusupi pengaruh dari luar, yakni kompeni.

Penyusupan kompeni memacu timbulnya konflik antar elit politik. Dalam pemikiran Jawa, politik perkawinan merupakan alat jejaring ikatan keluarga untuk memperkuat bangunan *patron-client*, serta alat kontrol terhadap anggota keluarga. Praktek di atas tidak efektif dalam membangun jaringan *patron-client*, karena masing-masing keturunan berkepentingan pada lingkaran kekuasaan. Sementara itu, keturunan raja yang berjumlah besar tentu sulit untuk dikontrol. Dalam hubungan dengan suksesi masing-masing keturunan membangun afiliasi dengan kekuatan politik lain yang saling berbeda. Afiliasi aristokrat dan kompeni dalam hubungannya dengan suksesi akan memperluas permusuhan terbuka antar elit politik. Mereka tidak memiliki konsensus dalam meletakkan landasan sistem politik negara, dan hal ini menjadi salah satu faktor dominan timbulnya kemerosotan politik abad XVI hingga awal XIX. Faktor lain yang mempercepat kemerosotan politik adalah: (1) Keberadaan pasukan militer di bawah kekuasaan para bupati *mancanegara*. (2) Secara sembunyi-sembunyi pejabat kompeni mendukung adanya intrik, faksionalisme, dan provokasi di lingkungan istana. (3) Rendahnya kemampuan para pejabat di pusat maupun di daerah dalam mengelola sistem administrasi pemerintahan. (4) tidak efektifnya perkawinan sebagai landasan ikatan politik.

Hadirnya kompeni di kerajaan tradisional, meski berada di pinggiran, dan belum sampai pada titik permusuhan kultural, tetapi pengaruh kompeni tersebut telah menjadi faktor perusak terhadap kesatuan politik kerajaan tradisional. Pada dasarnya kekuatan kompeni sangat terbatas dan hanya mengandalkan kekuatan yang dimiliki raja.

Tindakan kompeni selain memperlemah kedudukan raja juga mengganggu sistem politik, karena sistem politik kerajaan tradisional dibangun dari kumpulan hubungan *patron* dan *client*. Setiap gangguan terhadap sistem politik sekecil apapun dapat

mempengaruhi keadaan sosial ekonomi dan sosial politik kasultanan. Pada sisi lain, kumpulan *patron* dan *client* sangat terbatas, terdiri dari kelompok politik aristokrat dalam istana, aristokrat di luar istana, ulama istana, dan ulama di luar istana. Tidak masuknya pelaku ekonomi dalam kumpulan *patron* dan *client* istana, berakibat positif terhadap perkembangan Islam. Pelaku ekonomi cenderung dekat dengan kiai, dan turut membesarkan lembaga pendidikan Islam, yakni pesantren.

Pada umumnya aristokrat istana yang berseberangan dengan kebijakan raja ataupun yang bertindak sebagai oposisi cenderung 'disantrikan', dan hidup dalam lingkungan pesantren. Aristokrat yang disantrikan itu yang paling gigih melancarkan gerakan Islam, baik secara periferal maupun semi-periferal. Berpijak pada analisis konflik Ralf Dahrendorf bahwa dalam masyarakat terdapat peran-peran otoritas yang sifatnya tidak konstan tetapi peran itu cenderung menyatakan diri sebagai superordinași dan subordinasi. Sifat yang demikian itu maka dalam masyarakat terdapat asosiasi yang dikontrol oleh otoritas yang mempunyai kepentingan tertentu. Teori Ralf Dahrendorf dihubungkan dengan gerakan Islam di Jawa menunjukkan bahwa kelompok masyarakat miskin atau petani diasumsikan tidak memegang kendali gerakan Islam, karena kelompok masyarakat itu bersikap apatis terhadap kenyataan sosial dan ekonomi yang sedang mereka dihadapi. Mobilitas vertikal diri mereka (kaum tani) dapat terangkat oleh dinamika politik yang dilakukan kelompok elit yang memiliki status sosial ekonomi baik, atau dalam istilah Dahrendorf adalah kelompok yang memiliki peran otoritas.

Uraian di atas menunjukkan mereka yang mempunyai peran otoritas (aristokrat yang tersingkir dari sistem politik Hindia Belanda, pelaku ekonomi, dan kiai) membangun jaringan dan menjadi satu kekuatan politik. Pada dasawarsa pertama abad XX

model jejaring politik seperti di atas digunakan PB X sebagai alat untuk mengembangkan *civic engagement* (keterlibatan kewargaan) dan *political engagement* (keterlibatan politik) khususnya dalam hubungannya menghadapi kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang berkembang abad itu. Rendahnya keterlibatan politik berakibat tidak adanya hubungan simbiotik (timbal-balik) antara warganegara dan negara, karena itu elit politik mulai menggali landasan intelektual sebagai dasar etika dan moral dalam konteks pencarian hubungan antara warganegara dan negara. Penemuan pemikiran yang mereka peroleh menunjukkan tidak terbentuk struktur hubungan yang adil dan sejajar antara warganegara dan pemerintah Belanda. Karena itu pentingnya bagi warganegara membangun kekuatan politik melalui organisasi sosial maupun politik untuk menghadapi tekanan kolonial.

C. Munculnya Birokrasi Yang Menekan

Pasca Perang Jawa tahun 1830 pemerintah Belanda membentuk birokrasi *Binnenlandschbestuur* (BB) dan *Inlandschbestuur* (IB), yang berfungsi memperkuat kedudukan bupati di *pasisir* dan *mancanegara*. Kehadiran dua birokrasi baru mengakibatkan putusanya ikatan loyalitas antara raja dan bupati *pasisir* maupun bupati *mancanegara*. Denys Lombard melihat ada empat faktor yang mendorong putusanya ikatan loyalitas itu, yaitu: (1) terbentuknya priyayi otonom sebagai bupati di daerah, baik *pasisir* maupun *mancanegara*; (2) adanya strategi perkawinan antar keluarga bupati, dan tidak dengan keluarga istana; (3) priyayi otonom terbebas dari tugas menyediakan pasukan militer untuk kepentingan kerajaan; dan (4) bupati di daerah sangat tergantung pada sumber daya lokal sebagai landasan basis legitimasi politik mereka. Terputusnya ikatan loyalitas justru tidak dirasakan oleh para raja tradisional, karena raja tetap berkuasa dalam pemerintahan, dan

diizinkan untuk memiliki pasukan militer meskipun bersifat simbolis. Perubahan ini berakibat munculnya sebutan 'bupati raja'.

Pada umumnya birokrasi kabupaten (IB) dikelilingi dengan relasi juru tulis, selir, pelayan, magang dan *opas* (satuan pengamanan). Sementara itu sikap politik bupati daerah sangat tergantung pada pemerintah Batavia, dan mereka menekan rakyat selama periode tanam paksa maupun periode perkebunan swasta. Kenyataan ini mendorong ulama menarik legitimasi politik terhadap kekuasaan bupati. Penarikan legitimasi politik oleh ulama terhadap bupati dilatarbelakangi: (1) Meluasnya tindakan tidak terpuji oleh para birokrat kabupaten yang meminta bagian dari hasil produksi tanam paksa, bahkan elit birokrasi Belanda juga menuntut pembagian yang sama; (2) Peran bupati sebagai pengawas produksi pertanian cenderung mengeksploitasi tenaga petani. Tindakan para bupati tersebut dalam pemikiran ulama adalah tidak dibenarkan, dan mereka merupakan pelayan pemerintah kafir. Pada sisi lain, kekuasaan raja-raja Jawa dilucuti oleh Belanda, dan akibatnya raja membangun kembali komunikasi dan jejaring politik dengan ulama beserta basis massanya sebagai kekuatan politik, meskipun tindakan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Hadirnya birokrasi BB dan IB merupakan bentuk dari dualisme birokrasi kolonial. Dualisme birokrasi yang dibentuk pemerintah Belanda cenderung menindas rakyat, dan dualisme birokrasi itu berlangsung hingga tahun 1942. Bahkan Douwes Dekker dalam *Max Havelaar* [1860] sangat menentang kebijakan politik kolonial yang dipandang melampaui batas kemanusiaan. *Max Havelaar* selanjutnya menjadi simbol perlawanan anti kolonial Barat. Pada mulanya keberadaan BB bertujuan untuk membasmi feodalisme, tetapi justru sebaliknya dipraktekkan sendiri oleh birokrasi BB. Karena itu keberadaan BB sama artinya dengan konstruk masa VOC, yaitu adanya aliansi antara VOC dan kerajaan

tradisional. Aliansi ini bingkai kerja, yang terurai sebagai berikut: (1) birokrasi BB menjamin stabilitas keamanan; (2) birokrasi IB memberi kesempatan birokrasi BB untuk melakukan monopoli agraria; dan (3) birokrasi IB bertugas mengawasi produksi pertanian yang dijalankan oleh petani. Menurut Jean Gelman Taylor, dualisme birokrasi muncul akibat ketidakmampuan raja-raja Mataram mengendalikan intervensi kolonial. Mereka tidak mempunyai kemampuan membangun jaringan loyalitas dan mengendalikan bawahannya, baik pada tataran bupati yang berada di daerah maupun patih yang berada di lingkungan istana.

Jaringan perkawinan dan binanegara yang diterapkan raja-raja Mataram tidak cukup kuat untuk menciptakan jaringan loyalitas permanen. Pasca Perang Jawa 1830 seluruh bupati dan patih berada di bawah bayang-bayang pemerintah Belanda. Lemahnya jaringan loyalitas antara raja dan bupati berakibat negatif ketika raja harus berhadapan dengan intervensi kolonial yang sangat kuat intensitasnya. Kondisi yang dilematis ini mendorong patih dan bupati memilih melepaskan diri dari ikatan loyalitas dengan kerajaan tradisional, dan beralih dalam bayang-bayang kolonial. Kondisi politik di atas menunjukkan bahwa raja tidak mampu menemukan cara terbaik membangun jaringan loyalitas, dan tidak menyadari bahwa dirinya mampu menghadapi kekuatan asing. Di sisi lain, raja tidak melakukan koordinasi militer baik di pusat maupun di daerah, hal ini justru memberi celah-celah kolonial untuk melakukan politik 'pecah belah' yang menghancurkan kekuasaannya sendiri.

II. Paku Buwana X dalam Tekanan dan Tantangan

A. Bertakhta

Bendara Raden Mas Gusti (BRMG) Sayidin Malikul Kusno dilahirkan pada hari Kamis Legi, 29 November 1866 adalah putera PB IX dengan Bendara Raden Ajeng (BRA) Koestijah (Kanjeng

Ratu Paku Buwana). Pada usia tiga tahun diangkat menjadi putera mahkota dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom (KGPA) Amangku-nagara Sudibya Rajaputra Narendra Mataram V, dan naik tahta pada tanggal 30 Maret 1893 – 20 Februari 1939. PB X memerintah selama 46 tahun, meski dia ditekan secara ekonomi dan politik. Seluruh wilayah kekuasaannya diambil alih Belanda, dan Kuntowijoyo menyebut 'tertawan di keratonnya sendiri'. Tertawannya PB X akibat berlakunya Undang-Undang Desentralisasi Tahun 1903, reorganisasi agrarian, administrasi pemerintahan dan peradilan, serta diterapkan *beamtenstaat* yang melarang warga masyarakat melakukan kegiatan politik praktis. Namun, Sunan mampu menghadapi dengan mendorong mobilitas vertikal masyarakat melalui kebijakan mendirikan:

- (1) Madrasah Mamba'ul Ulum, 1905.
- (2) HIS Kasatryan, 1914.
- (3) HIS Parmadi Putri dan Taman Kanak-Kanak Parmadi Siwi, 1914.
- (4) Mendirikan *rijksstudiefonds*.
- (5) Bank *Bandhalumaksa*, 1918.
- (6) Memfasilitasi Kongres Budaya di Surakarta, 1918.
- (7) Pasar *Gedhe* Hardjonegoro, 1930.
- (8) Jembatan Jurug, 1913.
- (9) Jembatan Bacem, 1915.
- (10) Jembatan Mojo, 1916.
- (11) Rumah Sakit Panti Rogo dan Apotik Pantihusada, 1918.
- (12) Paheman Radya Pustaka, 1910.
- (13) Kebon Rojo (Sriwedari), 1902.
- (14) Membangun rumah singgah buruh migran 'Wangkoeng'.
- (15) Mendukung partai politik SI dan BO.
- (16) Memberi subsidi kepada perguruan Muhammadiyah.
- (17) Merenovasi Masjid di bawah yurisdiksi Keraton Surakarta.

- (18) Reformasi birokrasi untuk mendorong pemberdayaan, misalnya mendirikan lembaga *accountantie kantoer*, *bandha pasinaon*, *rijksstudiefond*, *kridha nirmolo*, dan *bale agung*.
- (19) Mendirikan lembaga pendidikan dalang, 1923.
- (20) Bangsal Sewayana di Sitihiinggil Lor, 1913.
- (21) Menambah bangunan Bangsal Smarakata dan Mercukunda, 1919.
- (22) Sasana Dayinta, 1915.
- (23) Memperbaharui Sasana Handrawina, 1919.
- (24) Pagelaran Sasana Sumewa, 1913.
- (25) Masjid Pudyasana, 1912.
- (26) Gapura Gladag, 1930.
- (27) Keraton Kilen, 1925. Sementara itu sumber dari GPH Puger pada tahun 1904.
- (28) Miniatur gunung yang disebut Argopura, 1911.
- (29) Mendirikan Tugu Peringatan, 1939.

Tekanan ekonomi, politik dan sosial yang sangat kuat menumbuhkan tantangan dalam diri pribadi Sunan. Dia berhasil melepaskan diri dari kepungan traumatis dan menampilkan diri sebagai agen perubahan. Analisis terhadap pemikiran Sartono Kartodirdjo tentang pembagian aristokrasi *protagonis* dan *status quo*, teori strukturasi Anthony Giddens dan model komunikasi Robert Dahl, mengisyaratkan bahwa Sunan memerankan diri sebagai agen perubahan, bahkan dengan kebijakan yang ditempuh saat itu (*decision making events*) dapat berkomunikasi dan mempengaruhi kelompok sosial maupun politik untuk berafiliasi dan berorientasi kepadanya.

Walaupun kebijakan pemberdayaan masyarakat yang ditempuh terbatas, tetapi berhasil memerankan diri sebagai agen (aktor) otonom. Hal ini akibat adanya kesadaran praktis bahwa kebijakan yang ditempuh adalah tindakan benar, dan proses

pemberdayaan dilakukan tanpa melalui 'propaganda politik', tetapi diwujudkan secara langsung. Tindakan pemberdayaan ditujukan: (1) Penataan struktur sosial. Penataan struktur sosial lebih utama dari pada memperluas gerakan protes. Penataan diwujudkan pendirian lembaga pendidikan yang dipandang memacu intelektualitas dan kegiatan ekonomi masyarakat, serta menghasilkan elit baru yang mampu menata tatanan politik 'baru'. Kaum intelektual itu diasumsikan piawai membangun landasan organisasi politik. (2) Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembangunan sengaja tidak dipropagandakan untuk menghindari polemik dengan para tokoh Insulinde/NIP, karena mereka berseberangan dengan Sunan. Bahkan dalam memberdayakan potensi lokal, dia sering tidak mepedulikan keberadaan pemerintah Belanda di Surakarta.

Kebijakan mendirikan infrastruktur pendidikan dan ekonomi memacu terbentuk komunikasi antar elit di Surakarta, baik elit istana, elit agama Islam, maupun intelektual. Bahkan ketika mengirim utusan berkunjung di Banten, 1902, Sunan menitipkan pesan kepada Tirtoadhisoejo. Pesan ditindaklanjuti Tirto dengan berbicara di depan Perkumpulan Abiproyo dan pengusaha Laweyan. Mereka setuju memberdayakan ekonomi kaum Muslim yang didukung seluruh elit Surakarta. Dorongan Sunan memacu tumbuhnya dinamika politik lokal di Surakarta. Dalam perspektif teori strukturasi, Sunan adalah agen, yang melalui kebijakannya memacu perubahan, baik perubahan politik di keraton maupun penataan struktur sosial. Keberanian memerankan diri sebagai agen berimplikasi pada pengabaian terhadap hilangnya kekuasaan politik, bahkan menjadi bebas melakukan perjalanan.

B. Undang-Undang Desentralisasi Tahun 1903, Reorganisasi Agraria dan Administrasi Pemerintahan Yang Menekan

Undang-Undang Desentralisasi 1903 adalah kelanjutan dari Undang-undang Agraria 1870. Dasar pemikiran undang-undang itu

adalah untuk mewujudkan tuntutan pengusaha Belanda dalam menswastakan bidang perkebunan dan perdagangan, serta tuntutan hak berbicara dalam pembuatan kebijakan ekonomi dan politik di Hindia Belanda. Pengusaha berpandangan pemerintah kolonial tidak mampu menyelesaikan permasalahan di daerah melalui sistem politik sentralistik. Untuk itu dibentuk pemerintah lokal, dengan maksud pribumi dapat menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Implikasinya adalah reorganisasi seluruh wilayah Hindia Belanda, baik sistem agraria maupun administrasi pemerintahan. Inti reorganisasi adalah: (1) wilayah Hindia Belanda dibagi dalam satuan-satuan daerah setingkat karesidenan, kabupaten, dan desa; (2) pemerintah daerah dijabat oleh pejabat tinggi Belanda, dan pejabat pribumi; (3) Gubernur Jenderal berhak menetapkan hubungan kekuasaan antar pejabat tinggi, pribumi, dan pihak-pihak lain; (4) kekuasaan sipil merupakan kekuasaan tertinggi; (5) menata tanah milik keraton sesuai UUD 1903, yang diefisiensikan menjadi perkebunan swasta.

Kebijakan di atas sangat merugikan keraton dan petani Surakarta, karena wilayah keraton yang sebagian besar untuk pertanian harus dirubah menjadi perkebunan tanaman ekspor. Sementara itu pemerintah daerah berwajib untuk mengatur administrasi pemerintahan, menyusun dan mencari anggaran belanja sendiri, serta dipertanggungjawabkan di dewan setempat (*locale raden*). Dua persoalan di atas memacu pemerintah daerah menyewakan lahan-lahan pertanian untuk mengisi kas daerah. Keuntungan yang diperoleh dari pemberlakuan UUD 1903 adalah Surakarta dan Yogyakarta merupakan daerah otonom. Daerah otonom diizinkan mendirikan sekolah swasta beserta pengajaran agama Islam, bahkan otonomi dipersepsikan elit politik boleh mendirikan organisasi sosial dan politik.

Akibat negatif reorganisasi agrarian dan administrasi pemerintahan yang membagi daerah hingga tingkat desa adalah: (1) pengetatan sistem administrasi birokrasi, (2) pengawasan ketat terhadap aktivitas masyarakat di tiap-tiap satuan daerah. Fenomena ini merupakan awal terbentuknya *beamtenstaat*, yang didefinisikan Ruth McVey sebagai '*the state as efficient bureaucratic machine*'. Maksudnya, negara adalah mesin birokrasi. Dalam struktur birokrasi ini, negara diurus oleh para pegawai, baik pada birokrasi *Binnenlandsbestuur* maupun *Inlandschbestuur*. Meskipun birokrasi bersifat rasional, tetapi dinas polisi rahasia sangat berperan memapankan birokrasi, bahkan dinas polisi rahasia sering melakukan isolasi terhadap individu dan kelompok masyarakat yang melakukan gerakan protes. Karena itu *beamtenstaat* disebut pula negara *a politik*.

C. Reorganisasi Peradilan

Selain reorganisasi agraria dan administrasi pemerintah, kebijakan lain yang dilakukan adalah reorganisasi peradilan. Reorganisasi ini ditujukan untuk menghapus sistem peradilan keraton beserta kitab undang-undang hukum pidana maupun perdatanya, yang tertuang dalam *Serat Angger-anggeran Jawi*. Keresahan sosial dan gerakan Islam di pedesaan pada dua dasawarsa terakhir abad XIX mengganggu keberlangsungan perkebunan dan perdagangan. Kerusuhan belum dapat diatasi oleh sistem keamanan keraton. Banyak faktor yang melandasi, yakni: (1) meluasnya kemiskinan; (2) hilangnya kedaulatan penguasa tradisional; (3) makin melebar kesenjangan sosial antar kelompok sosial dalam masyarakat.

Lembaga peradilan keraton meliputi *Surambi Masjid*, *Pradata Negri*, *Pradata Kadipaten*, dan *Pradata Kabupaten*. Sementara itu *Surambi Masjid* di pusat kerajaan dipertahankan dengan tugas menangani masalah perkawinan, warisan, dan wasiat,

sedangkan *Surambi* Masjid di kabupaten dihapuskan. *Pradata Kadipaten* dan *Pradata Kabupaten* diganti lembaga peradilan baru yang dibentuk Belanda, yaitu: *Lanraad*, Pengadilan Kabupaten, *Rol Polisi*, *Rad Agama*, dan Pengadilan Karesidenan. Penghapusan peradilan adalah konsekuensi logis instabilitas politik dan keamanan.

III. Paku Buwana, Kerabat Keraton dan Kaum Intelektual dalam Pergerakan Kebangsaan

Salah satu faktor yang mendorong tumbuhnya dinamika politik di Surakarta adalah munculnya pendidikan swasta. Sejak diberlakukan politik etis, keraton mendirikan madrasah dan sekolah umum untuk anak *sentana*, *abdi*, dan *kawula dalem* yang tidak terakomodasi sistem pendidikan kolonial. Makin kuatnya peningkatan intelektualitas anak *sentana*, *abdi*, dan *kawula dalem* adalah indikasi bahwa basis politik berpindah kepada masyarakat, dan tidak bertumpu pada elit tradisional. Perubahan orientasi ini menunjukkan bahwa keraton menerima nilai-nilai kemodernan dan kemanusiaan. Tafsiran nasionalis garis keras yang dipelopori dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, H.M. Misbach dan Mas Marco Kartodikromo menggambarkan bahwa keraton utamakan kepentingan kelompok, dan mengabaikan kesejahteraan rakyat. Kaum nasionalis garis keras sangsi terhadap kemampuan PB X di panggung politik *Vorstenlanden*, karena: (1) PB X tidak memiliki pendidikan formal; (2) orientasi politik yang dianut bersifat etnosentris; dan (3) wawasannya sempit, sehingga tidak mampu membangun komunikasi dan jejaring politik dengan tokoh-tokoh pergerakan.

Tekanan terhadap keraton membangkitkan kesadaran aristokrat *protagonis* (pro gerakan kebangsaan). Banyak di antara mereka tidak mengenyam pendidikan, tetapi mampu membangun kekuatan politik. Abdurrahman Soerjomihardjo mengutip laporan Residen Yogyakarta mengemukakan bahwa putera HB VII

mendirikan perkumpulan *Dhikir Pitoengleksan* yang berafiliasi dengan sayap garis keras dari organisasi Muhammadiyah. Kesadaran aristokrat *protagonis* merupakan cermin munculnya aristokrat berkarakteristik modern, yang memiliki watak dan sifat berbeda dengan priyayi pangreh praja (aristokrat *pro status quo*). Aristokrat *protagonis* berusaha membangun identitas baru dengan melibatkan diri dalam dinamika politik lokal Surakarta. Tindakan itu berguna untuk memobilisasi kelompok sosial yang terpinggirkan secara politis maupun ekonomis. Berikut ini diuraikan hubungan PB X dengan organisasi politik, baik Sarekat Dagang Islam (SDI), Sarekat Islam (SI), Boedi Oetomo (BO) maupun Insulinde.

A. Paku Buwana X dan Boedi Oetomo

Berdirinya Boedi Oetomo (BO) pada Rabu, tanggal 20 Mei 1908, di Weltevreden (Jakarta) merupakan gagasan pelajar *School tot Opleiding voor Indische Artsen* (STOVIA). Pendirian BO dilandasi pemikiran bahwa pendidikan formal belum dapat dinikmati masyarakat kelas bawah, meskipun dasar kebijakan etis membuka kesempatan bagi priyayi rendahan dan rakyat untuk memasuki dunia pendidikan formal. Pemberlakuan kebijakan etis dilandasi kenyataan bahwa administrasi birokrasi Hindia Belanda mensyaratkan pegawai berpengetahuan dan berketerampilan teknis. Sementara itu ketersediaan intelektual untuk mengisi birokrasi administrasi sangat terbatas. Hal ini merupakan akibat dari: (1) anak-anak usia sekolah yang diterima di sekolah pemerintah berasal dari kelompok sosial atas; (2) diskriminasi pendidikan berakibat adanya perbedaan jenis sekolah dan kurikulum pendidikan (ELS, HIS, dan Sekolah Kelas Satu dan Dua); dan (3) biaya sekolah sangat mahal dan tidak terjangkau oleh kelas sosial bawah.

Praktek politik pendidikan itu menimbulkan rasa prihatin pelajar STOVIA, sehingga salah satu tujuan pendirian BO adalah penggalangan bea siswa (*studiefonds*) untuk membantu pelajar

pribumi yang mempunyai kecakapan, tetapi tidak memiliki biaya pendidikan. Pemberian bea siswa diutamakan pada mereka yang belajar di sekolah sekuler, bukan sekolah Islam (madrasah), tetapi pemikiran pelajar STOVIA belum tentu diterima oleh orang tua siswa yang memegang teguh syariat Islam. Mereka cenderung memilih memasukkan anak-anak mereka pada sekolah Islam, madrasah. Pemberian bea siswa menunjukkan BO organisasi progresif. Artinya, perjuangan BO cenderung diarahkan untuk menata sumber daya pribumi sebelum mereka memasuki dunia politik 'praktis'.

Penataan sumber daya pribumi bergayut sambut dengan tujuan *Pakualam Studie Fonds*. Karena itu BO didukung penuh oleh keluarga Pakualaman, baik Kongres BO I pada tanggal, 3-5 Oktober 1908, di Yogyakarta, maupun Kongres BO II pada tanggal, 10-11 Oktober 1909. Dukungan penuh keluarga Pakualam karena BO adalah organisasi politik pribumi pertama di Jawa. PB X kurang hangat melihat perkembangan BO di Yogyakarta, meskipun dia bersimpati terhadap pemikiran pelajar STOVIA, terutama mengenai nilai kebebasan, humanis, sekuler, progresif, dan keselarasan hidup. Sikap PB X tidak masuk akal, karena hanya didasari penetapan kantor pusat BO di Yogyakarta. Rupanya citra perselisihan masa lalu teringat di benaknya. Uraian Dwidjosewojo dan Sastrowidjono mengenai peningkatan sumber daya pribumi sebagai kekuatan politik makin mempertajam ketertarikan PB X terhadap BO.

Pemikiran Sastrowidjono menyiratkan: (1) pentingnya *self-sufficiency* yang diwujutkan dalam kebijakan pemberdayaan pendidikan dan ekonomi; (2) membangun hubungan dengan pedagang dan pengusaha Muslim; (3) membangun semangat kebangsaan yang mulai memudar. Pemikiran itu ditujukan agar BO menjadi organisasi besar. Suatu organisasi politik tidak menjadi besar dan memperoleh dukungan bila pendukungnya miskin.

Berkurangnya kemiskinan akan membentuk kelas menengah mapan, dan memacu kerjasama antar kelompok sosial dan politik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemikiran Sastrowidjono diabaikan, karena pendukung utama BO menolak. Akhirnya, pemikiran Sastrowidjono tidak masuk program kerja BO. Penolakan itu menunjukkan bahwa pemikiran pangreh praja berkarakter 'sektarian' (mengutamakan diri sendiri). Mereka mengendarai dan mengendalikan BO dalam bingkai 'tatanan politik asosiasi'. Bagi PB X mobilitas vertikal adalah faktor penting untuk menumbuhkan kesadaran praktis. Bangkitnya kesadaran memacu rakyat menguasai objek-objek yang berkaitan dengan hajat kehidupan mereka. Untuk mewujudkan dikeluarkan kebijakan perluasan pendidikan dan pengembangan sarana perekonomian rakyat. Tindakan ini akan menambah jumlah kelompok intelektual, pelaku ekonomi, pekerja sosial, dan lain sebagainya. Mereka akan saling terkait, dan keterkaitan itu mendorong munculnya kesadaran praktis. Kesadaran juga menjadi modal dasar 'kesadaran politis', terutama dalam hak menentukan nasib sendiri. Dalam hubungan ini kesadaran elit politik di Surakarta diawali dengan pemikiran etnisitas yang berwujud nasionalisme Jawa, dan selanjutnya menapaki jenjang pemikiran kebangsaan. Fenomena pemikiran ini dapat dilihat dari pertumbuhan organisasi politik di Indonesia, mulai dari berdirinya BO (Jawa), SDI dan SI (Islam) hingga Partai Nasional Indonesia (kebangsaan).

B. Paku Buwana X dan Sarekat Islam

Hubungan PB X dan tokoh SI dapat ditelusuri dari komunikasi politik antara PB X dan RM Tirtoadhisoerjo. Proses komunikasi bermula ketika RM Ng. Prodjo Sapotetro diutus mengunjungi Banten, April 1902. Dalam kunjungan itu, Prodjo meminta Tirto sebagai pemandu. Hal ini berkaitan dengan pesan Sunan yang meminta Tirtoadhisoerjo untuk mengelola mingguan

berkala *Bromartani* yang sedang menghadapi krisis manajemen. Pada akhir kunjungan Tirtoadhisoejo diberi kenang-kenangan destar dan kain batik. Kenang-kenangan itu secara simbolik bermakna:

- (1) Sunan ingin membangun kerjasama dengan Tirtoadhisoejo untuk meningkatkan kemampuan elit Surakarta dalam mendirikan organisasi sosial dan politik. Tirtoadhisoejo dipersepsikan sebagai sosok berpandangan kuat mengenai pentingnya pemulihan ekonomi dan politik. Visi ekonomi Tirtoadhisoejo adalah menegakan dan menghargai potensi diri pelaku ekonomi, baik pengusaha dan pedagang batik, sedangkan visi politiknya adalah menentang tekanan dan hegemoni kolonial.
- (2) Tirtoadhisoejo adalah jurnalis tangguh dan berani. Dia mampu membangun opini publik, dan membongkar kebijakan politik kolonial yang merugikan pribumi.
- (3) Kenang-kenangan adalah simbol yang di dalamnya tersirat keinginan memulihkan harga diri dan martabat bangsa dengan memanfaatkan Islam sebagai kekuatan penyangga. Komunikasi simbolik itu mengisyaratkan terjadi perubahan orientasi politik di Keraton Surakarta, yakni dari perspektif tradisional menuju politik partisipasi massa.

Sejak tahun 1904 Tirtoadhisoejo melakukan perjalanan secara rutin Batavia-Solo dan Bandung-Solo untuk melakukan transaksi batik dengan pengusaha batik Laweyan, dan menjadi distributor mingguan *Darmokondo* (1904-1939). Selama di Kota Surakarta Tirtoadhisoejo menemui elit keraton dan pengusaha batik Laweyan. Sepanjang kegiatan di Surakarta, dia menjalin hubungan dengan Paguyuban Abiproyo (organisasi sosial bangsawan) dan Rekso Roemekso (paguyuban pengusaha batik Surakarta). Dalam pertemuan dengan Paguyuban Abiproyo, dia meminta agar pengusaha dan pedagang batik harus mendapat penghargaan dan

perlindungan, bahkan usaha tersebut harus dikembangkan dan dipertahankan.

Pada 1912, diadakan pertemuan antara Tirtoadhisoejo dan KH. Samanhedhi, M. Asmodimedjo, M. Kertotaroen, M. Sumowerdojo, dan HM. Abdoerradjak. Inti pembicaraan adalah monopoli bahan batik oleh pedagang Tionghoa, serta keinginan untuk mendirikan perhimpunan pengusaha dan pedagang batik. Hasil pertemuan disepakati didirikan SDI di Surakarta yang merupakan cabang SDI Bogor. Pendirian SDI adalah untuk membangun solidaritas umat Islam, serta melindungi pengusaha dan pedagang batik. Menurut Agus Salim, Revolusi Cina 1911 memicu perubahan sikap orang Tionghoa di Hindia Belanda. Orang Tionghoa memandang rendah pengusaha dan pedagang pribumi yang bergerak dalam industri batik. Hal ini memacu ketegangan antar mereka, bahkan orang Tionghoa memandang diri mereka sejajar dengan Belanda, meski sistem diskriminasi sosial tetap diberlakukan Belanda, yaitu sebagai kelompok timur asing. Perubahan menjadi SI adalah strategi untuk meraih basis massa yang lebih luas. Praksis perubahan adalah akibat mendapat izin dari Gubernur Jenderal Idenburg (1909-1916).

Menurut Aqib Suminto perubahan dari SDI menjadi SI karena meningkatnya gerakan radikal di pedesaan, terutama tuntutan perbaikan kesejahteraan hidup buruh perkebunan. Ada beberapa faktor yang memacu gerakan radikal, yakni: (1) kemiskinan struktural di pedesaan yang tidak dapat diatasi dengan kebijakan reorganisasi agraria dan administrasi pemerintah; (2) kuatnya gerakan politik pada dasawarsa abad XX yang beraliran lain, yakni nasionalis, sosialis, dan marxis, yang juga memacu radikalisasi; (3) masing-masing aliran politik bergerak sendiri-sendiri tanpa bersinergi dan berkoordinasi.

Munculnya radikalisme di Surakarta menguntungkan SI, karena jumlah anggota organisasi tersebut bertambah pesat. Keanggotaan SI dapat dipilah dalam lima kelompok, yakni: (1) aristokrat protagonis, (2) pengusaha Muslim, (3) jurnalis, (4) intelektual, dan (5) masyarakat kota maupun pedesaan. Dalam konteks pemikiran Herbert Feith kelima kelompok itu beraliran tradisionalisme Jawa, Islam, dan nasionalisme radikal. Aliran ini cermin dari kekuatan politik masyarakat.

Aristokrat protagonis masuk SI adalah wujud perubahan orientasi politik menuju politik partisipasi massa. Sementara itu SI mengutamakan perhatian pada kesatuan dan persatuan umat Islam, serta mengesampingkan kontroversi mengenai aliran dalam Islam [Islam Jawa dan Islam syariat]. Faktor ini yang memacu aristokrat protagonis memasuki SI. Pada sisi lain jurnalis berperan pembangkit opini dan mobilitas politik. Kelompok intelektual dan pengusaha berperan mengelola keberlangsungan organisasi, sedangkan masyarakat kota dan desa pendukung organisasi. Dukungan mereka tergantung pada keberpihakan dan usaha SI dalam memacu mobilitas vertikal.

Kelompok intelektual pendukung SI adalah tokoh dan masyarakat Muslim. Di Surakarta SI didukung Pesantren Jamsaren, Madrasah Mambaul Ulum (1905), dan Madrasah Arabiyah Islamiyah (1909). Keterlibatan PB X dalam organisasi politik merupakan identifikasi diri atau orientasi sikap politik. Pengertian orientasi politik adalah: (1) adanya kepercayaan terhadap politisi; (2) secara psikologis menaruh sikap toleran terhadap partai politik; (3) orientasi dipersepsikan akan membangkitkan basis massa yang lebih luas; (4) orientasi dapat mendorong terjadinya integrasi politik; dan (5) orientasi politik bisa memicu konflik politik, bila diartikulasikan sebagai perjuangan antar politisi untuk meraih dan memperebutkan basis massa, baik yang belum dikuasai maupun yang sudah dikuasai.

Sikap politik mendorong penentuan orientasi politik. Gejala ini yang memacu tumbuhnya politik aliran pada masa pergerakan bangsa. Konsistensi PB X terhadap orientasi politik dapat dilihat dari usaha-usaha Sunan untuk menata struktur sosial masyarakat melalui pemberdayaan pendidikan dan ekonomi pribumi, bahkan dia rela melindungi organisasi sosial dan politik dari 'sengatan' para pejabat Belanda di Surakarta. Dalam kunjungan ke daerah-daerah, dan dianggap masyarakat setempat sebagai pendiri SI dan pendukung BO. Kunjungan itu (perjalanan *incognito*) menjadi ajang kampanye terselubung untuk memberi dukungan terhadap organisasi tersebut.

Dalam hubungannya dengan sistem *beamtenstaat*, tentu perjalanan *incognito*, dapat berpeluang membuka 'isolasi politik' kawasan pedesaan, karena: (1) Di setiap persinggahan Sunan dielu-elukan masyarakat setempat. (2) Sunan berusaha menjalin komunikasi dengan tokoh setempat, serta memberi cinderamata. Komunikasi dan cinderamata adalah bentuk persahabatan yang multi tafsir. (3) Stigma yang melekat dalam diri Sunan adalah pendiri SI, dan hal ini diyakini oleh masyarakat setempat. Gambaran itu menunjukkan Sunan adalah elit politik yang disegani oleh berbagai lapisan masyarakat.

C. Paku Buwana X dan Insulinde

Orientasi sikap politik Sunan terhadap BO dan SI tidak hanya mencitrakan integrasi politik, tetapi dapat memicu konflik antar aliran dalam bingkai pergerakan kebangsaan. Konflik identik dengan relasi konfrontatif karena perbedaan persepsi, sikap, dan tindakan politik. Awal pergerakan, relasi konfrontatif antara kelompok moderat dan garis keras menonjol, terutama antara Tjipto Mangoenkoesoemo dan PB X.

Konfrontatif itu merupakan citra tidak percaya terhadap kemampuan elit keraton. Bahkan Tjipto Mangoenkoesoemo memandang elit keraton tidak mampu melepaskan budaya otoriter,

serta tidak dapat memahami budaya demokrasi. Pada saat kekuasaan mereka 'diamputasi' oleh pemerintah Belanda, mereka terkejut, dan membangun simbolisme kekuasaan di atas perangkat budaya keraton yang 'rumit dan megah'. Kenyataan ini ditafsirkan kesulitan elit melepaskan 'tradisionalisme', dan tidak mampu menerima 'kemodernan' yang lengkap dengan pemikiran 'keindonesiaan'.

Tjipto Mangoenkoesoemo, Muhammad Misbach, dan Mas Marco Kartodirromo tidak nyaman terhadap kiprah politik PB X dan kerabat keraton, hal ini justru memperluas relasi konfrontatif. Landasan gerakan Islam sebagai alat politik yang dilancarkan Sunan mencitrakan paradigma kooperatif, dan menjadi sasaran kritik serta provokasi, baik di surat kabar maupun rapat umum. Elit keraton dipandang sebagai elit yang lemah dan tidak mampu bertindak untuk kepentingan rakyat.

Kelemahan pemikiran politik Tjipto Mangoenkoesoemo, Muhammad Misbach, dan Mas Marco Kartodikromo adalah tidak mampu membedakan kategori aristokrat protagonis dan aristokrat *status quo* (pangreh praja). Aristokrat protagonis lebih banyak terlibat dalam pergerakan dengan tujuan membangun kolektivitas politik, sedangkan aristokrat *status quo* terayomi oleh struktur birokrasi kolonial, yang secara jelas berpihak kepada pemerintah Belanda.

Relasi konfrontatif dalam pemikiran Benedict Anderson adalah simbolisasi konflik antara golongan muda dan tua. Kerumitan konflik antara golongan muda dan tua, tidak mudah terjembatani oleh komunikasi politik, karena golongan muda menampilkan persepsi unik dalam pemikiran maupun perilaku politik, terutama kecenderungan menempatkan ranah perbedaan, misalnya masalah pangreh praja dan non-pangreh praja, priyayi dan non-priyayi, sekolah umum dan madrasah, laki-laki dan perempuan, serta pribumi dan non-pribumi. Perbedaan itu diciptakan, baik dalam sistem

pendidikan kolonial, interaksi sosial, maupun komunikasi. Perbedaan ini berakibat terbangun struktur sosial yang memperuncing 'orang lain' (*the other*).

Upaya membangun struktur sosial *the other* ditujukan untuk melindungi modal usaha kolonial yang sudah tertanam dalam industri perkebunan, eksplorasi (perminyakan dan pertambangan), serta industri pabrikaan. Ada dua akibat yang ditimbulkan dari bangunan struktur sosial *the other*, yaitu:

- (1) Kelas menengah pribumi cenderung mengikuti arus budaya Barat, baik berkaitan gaya hidup maupun cara berpikir mereka, sehingga sikap mereka ditafsirkan Belanda sebagai moderat dan kooperatif. Tampilan kemodernan itu adalah simbol keunggulan peradaban Barat dalam tata ruang kehidupan masyarakat pribumi.
- (2) Struktur sosial *the other* memperuncing 'segregasi politik'. Kekuatan politik terpecah dalam aliran, dan tak akan tercipta kolektivitas politik. Tidak adanya sinergi antar partai maka kekuatan pribumi berada di pinggiran, dan sulit menghadapi kekuatan dominan (negara kolonial). Konsekuensi lemahnya sinergi adalah meluasnya provokasi elit terhadap masyarakat pedesaan. Dalam sistem politik *beamtenstaat*, pedesaan adalah daerah massa mengambang (*floating mass*) yang tidak boleh dijamah kegiatan politik. Provokasi terhadap masyarakat pedesaan merugikan, karena basis kekuatan partai lemah, sehingga pemimpin partai akan terkena pasal hukum kolonial, "mengganggu ketertiban dan keamanan".

Relasi konfrontatif justru memacu ketegangan politik di Surakarta. Pada Juli 1919, Samanhoedi dan Martodharsono mengundang wakil-wakil masyarakat Surakarta (pengusaha dan pedagang batik, jurnalis, dan elit keraton) untuk membicarakan provokasi Tjipto Mangoenkoesoemo. Mereka membentuk Komite

Keselamatan Rakyat Surakarta (*Comite Rahayat Vorstenlanden*). Komite ingin mempertahankan kewibawaan raja dan otonomi Surakarta. Keanggotaan komite meliputi kelompok sosial dalam masyarakat, baik partai politik (SI) maupun Tentara Kanjeng Nabi Muhammad (TKNM). Gejala ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap gerakan Sunan sangat besar, tetapi dukungan (SI dan BO) terhadap Sunan justru menunjukkan indikasi rendahnya pemikiran keberagaman dalam dinamika pergerakan. Namun, dukungan itu cermin dari struktur budaya lokal yang: (1) menghormati eksistensi elit keraton, (2) psikologi masyarakat yang menghargai perubahan politik di Kasunanan, dan (3) penghargaan masyarakat terhadap kebijakan Sunan dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Tjipto mencela pemikiran Sunan, BO, dan SI yang mengikuti garis politik etis. Konfigurasi politik etis dipandang Sunan paling ideal dalam konteks sistem *beamtenstaat*, karena sistem itu adalah kebijakan demobilisasi politik, dan menekan pertumbuhan nasionalisme. Pada sisi lain, pemikiran Tjipto Mangoenkoesoemo beserta Insulinde/NIP-SH menghendaki adanya proses evolusi yang sehat dalam perjalanan menuju kemerdekaan. Dengan demikian pemikiran politik Tjipto Mangoenkoesoemo dan PB X berada dalam bingkai yang sama, yakni kedaulatan bangsa, meskipun sifat perjuangan berbeda, yakni secara kooperatif dan non-kooperatif.

Relasi konfrontatif yang muncul dalam dinamika politik pergerakan menunjukkan rendahnya hidup kewargaan (*civic engagement*) dan rendahnya keterlibatan politik (*political engagement*) antar kelompok dalam politik pergerakan. Hal ini membawa konsekuensi rentannya sikap toleransi dan sikap percaya terhadap lembaga politik. Rentannya toleransi terhadap lembaga politik merupakan karakter pergerakan tahun 1920-an. Karakter itu: (1) Elit politik cenderung mudah melakukan konsolidasi yang diwujudkan pembentukan organisasi politik yang beraliran

tradisionalisme Jawa, Islam, dan nasionalisme. Ketiga aliran itu belum bersinergi dan menjadi kekuatan politik di Surakarta. (2) Elit politik belum dapat menerima pemikiran keberagaman dalam dinamika politik pergerakan, khususnya aliran-aliran politik sosialisme dan marxisme. (3) Mudah-mudahan timbul friksi antar elit politik, sehingga keberlangsungan suatu partai politik tidak terlalu lama. (4) Friksi antar elit politik berakibat program unggulan partai sulit untuk diwujudkan.

Dukungan PB X terhadap BO dan SI adalah konsistensi mempertahankan aliran tradisionalisme Jawa dan Islam sebagai pilar politik Kasunanan. Pilar politik itu dibangun mengikuti pemikiran politik Sultan Agung, dan dibangkitkan kembali pada dasawarsa kedua abad XX untuk memacu dinamika politik di Surakarta. Sunan beranggapan bahwa menyatunya dua aliran itu dalam pilar politik pergerakan dapat menyatukan kekuatan rakyat, baik dalam pembentukan kekuatan (*machtsvorming*) maupun menggerakkan kekuatan (*machtsaanwendings*).

Ada dua hal yang dapat dicermati dari pemikiran Sunan, yaitu: (1) aliran politik tradisionalisme Jawa dan Islam dimungkinkan bersinergi dengan aliran nasionalisme radikal; (2) aliran politik yang bersinergi bernaung dan menjadi kekuatan politik yang tercermin dalam SI dan BO; (3) adanya sinergi kekuatan itu dapat menekan *beamtenstaat*. Politik *beamtenstaat* merupakan cermin negara kuat, mengakibatkan seluruh saluran ekonomi dan politik dikuasai oleh kelompok sosial dan politik yang dekat dengan penguasa kolonial. Pada sisi lain, mobilitas vertikal tidak berkembang, dan partisipasi politik masyarakat disumbat oleh kekuatan negara. Dengan demikian negara kolonial telah memerankan diri sebagai pemerintahan teror, dan ketidakberdayaan masyarakat secara ekonomi maupun politik justru mudah dibangkitkan menjadi gerakan perlawanan rakyat.

D. Kesadaran Politik Kerabat Keraton

Awal gerakan politik PB X sudah mencitrakan Islam dan Jawa, sehingga konsekuensi dari pemikiran itu adalah kesediaan melakukan konversi politik dari politik tradisional menuju politik partisipasi massa. Artinya, elit istana (baik putera, menantu, maupun kerabat) siap terjun dalam dunia politik praktis. Partisipasi elit istana dalam SI dan BO menimbulkan relasi konfrontatif dengan kelompok nasionalis garis keras, yaitu Tjipto Mangoenkoesoemo, Muhammad Misbach, dan Mas Marco Kartodikromo. Relasi konfrontasi memacu tumbuhnya dinamika politik, khususnya terbentuk polarisasi politik, baik organisasi politik berwacana kooperatif maupun non-kooperatif.

Lambatnya kesadaran politik elit istana disebabkan: (1) Budaya masyarakat menempatkan elit istana pada lapisan sosial atas. Fenomena ini berakibat interaksi sosial antara elit istana dan masyarakat tidak intensif. Salah satu kendala adalah tradisi dan budaya istana yang menyekat interaksi dan komunitas antar kelompok sosial. (2) Kehidupan ekonomi mereka sangat mapan, dan kecil kemungkinan memikirkan persoalan ekonomi, politik, dan sosial yang mereka dihadapi. (3) Pemerintah Belanda mempertahankan sekat sosial itu untuk mempertajam struktur pemikiran mengenai *the others*.

Pada awal abad XX, anak-anak *sentana* dan *abdi dalem* telah menyelesaikan pendidikan tinggi, dan terpacu memasuki dunia politik praktis yang berorientasi pada pemikiran politik PB X. Hal ini dilatarbelakangi: (1) mereka dekat dengan putera PB X; (2) anak-anak *sentana* dan *abdi dalem* yang memperoleh bea siswa *rijksstudiefond* melanjutkan pendidikan pada jenjang lebih tinggi; (3) anak-anak *sentana* dan *abdi dalem* tersebut memiliki jejaring politik dalam skala nasional, dan jejaring politik itu digunakan untuk

membangun interaksi, komunikasi, dan partisipasi dalam organisasi politik atau partai politik.

Anak-anak yang memperoleh bea siswa adalah: Prof. Dr. Mr. Soepomo, dr. Radjiman Widiodiningrat, Mr. Soesanto Tirtoprodjo, Prof. Dr. Poerbatjaraka, Prof. Dr. Mr. Wiryono Prodjodikoro, Prof. Dr. Mr. Notonagoro, Mayor Jenderal Polisi Domo Pranoto. Pengantar disertasi Poerbatjaraka yang dipertahankan di Universitas Leiden (1926), disampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Sri Paduka Susuhunan PB X. Lebih lanjut Poerbatjaraka mengemukakan:

“Sri Paduka Susuhunan Pakubuwana X di Surakarta yang telah menyekolahkan saya di Sekolah Eropa [*Europesche Lagere School*, ELS] di Sala bersama dengan putera-puteranya sendiri. Andaikan ini tidak terjadi, tentu saya tidak akan pernah berkemampuan membuat ...[disertasi] ini, karena saya tentu tidak akan bisa berbahasa Belanda.”

Sebelum elit istana terjun dalam politik praktis, mereka mengasah keterampilan pada Perkumpulan Abipraya (1904) dan Narendra Putra (1908). Dalam perkembangannya, Narendra Putra berubah menjadi Narpawandawa. Yang dimaksud Perkumpulan Abipraya adalah organisasi priyayi pegawai keraton, sedangkan Narpawandawa adalah organisasi para bangsawan keturunan raja Kasunanan. Para priyayi yang tergabung dalam organisasi itu menyadari bahwa masyarakat Surakarta harus dimajukan kehidupan mereka, dan ekspresi pemikiran ini ditafsirkan sebagai ‘kesadaran diri’.

Pertemuan antara Abipraya dan Tirtoadhisoeerjo, pada 1904, Tirtoadhisoeerjo mengemukakan pandangan: (1) meminta anggota Abipraya memposisikan sebagai patron pengusaha dan pedagang batik; (2) memasuki abad XX, anggota Abipraya harus berperan

dalam organisasi yang bergerak dalam bidang politik maupun ekonomi, karena mereka adalah: (a) tokoh yang pernah mengenyam pendidikan Barat; (b) elit adalah kelompok sosial yang mudah merekrut kekuatan massa; dan (c) mereka adalah kelompok sosial yang mampu membangkitkan perlawanan politik rakyat terhadap kekuasaan kolonial.

Pertemuan itu memacu elit istana terjun dalam dunia politik praktis. Hal ini dapat diamati dari keikutsertaan mereka dalam kepengurusan SI (1912) dan BO (1916). P. Hangabehi (putera mahkota) dan RMA. Woerjaningrat (menantu Sunan) menjadi pengurus SI dan BO, Hangabehi menjadi pelindung Centraal Comite SI, dan RMA. Woerjaningrat menjadi Ketua BO Cabang Surakarta, sedangkan kerabat banyak yang menjadi anggota SI. Keluarga istana yang menjadi anggota SI adalah RMA. Poespodiningrat (Bupati Nayoko), KRT. Wiryodiningrat (putera dari penasihat Sunan), dan Soerjodiningrat (menantu dan pejabat Kasunanan). Keterlibatan dalam organisasi SI dan BO menimbulkan kekhawatiran Residen G.F. van Wijk (1909-1914), karena keterlibatan tersebut memacu mereka bersentuhan dengan gerakan politik Islam di Surakarta.

IV. Reaksi Belanda dan Perubahan Politik Kasunanan

A. Reaksi terhadap Gerakan Politik Paku Buwana X

Sejak semula gerakan politik yang dilancarkan PB X mencitrakan gerakan politik Islam yang dibingkai dalam nasionalisme Jawa. Konsekuensi dari tindakan tersebut adalah kesediaan untuk melakukan konversi dari politik tradisional yang dianut menuju politik partisipasi massa. Artinya, elit politik keraton (baik putera, menantu, maupun kerabat) siap menerjuni dunia politik praktis dan tidak khawatir terhadap 'senjata' *exorbitante rechten* yang berfungsi untuk menegakan *rust en orde*.

Exorbitante rechten dan *rust en orde* adalah landasan yuridis pemerintah untuk melancarkan politik pengurungan (*policy of containment*) terhadap tokoh pergerakan. Politik pengurungan merupakan pembatasan ruang gerak elit politik dalam organisasi kepartaian yang dipersepsikan mengganggu ketertiban dan keamanan. Dukungan dan partisipasi politik elit istana terhadap SI menuai reaksi keras dari pemerintah. Adalah logis bila pada akhirnya P. Hangabehi (putra mahkota), ketua kehormatan SI, terkena *exorbitante rechten* dan diasingkan di Negeri Belanda. Larangan elit istana menjadi anggota organisasi politik dilandasi alasan bahwa keberadaan elit istana akan mempercepat proses penggalangan massa. Bila keberadaan elit istana bertahan di organisasi itu dikhawatirkan akan meletus konflik antara massa Islam dan pemerintah Belanda.

Fred R. von der Mehden memandang Islam merupakan kekuatan sosial dan politik, karena Islam telah melekat dalam struktur sosial maupun budaya masyarakat, sehingga gerakan yang ditampilkan tokoh Muslim mencerminkan simbol kebangsaan. Pada sisi lain Sartono Kartodirdjo melihat bahwa Islam merupakan identitas politik nasional, dan gerakan politik Islam yang dilancarkan sepanjang abad XIX hingga dasawarsa kedua abad XX ditujukan untuk melawan pemerintah kolonial di Hindia Belanda.

Sepanjang masa kolonialisme Belanda ada empat bentuk pengurungan politik terhadap institusi keraton, yaitu: (1) Pengambilalihan daerah kekuasaan raja, khususnya Pasisir dan Mancanegara. Kedua daerah itu dijadikan industri pertanian ekspor. (2) Membentuk birokrasi dinamakan *Binnelandsbestuur* (pemerintah dalam negeri) yang dikelola pejabat Belanda, dan *Inlandschbestuur* (pemerintah daerah) yang dikelola priyayi 'baru'. Priyayi ini merupakan kelompok sosial yang dipandang mampu bekerjasama dengan pemerintah Belanda. Berdirinya *Binnenlandsbestuur* dan

Inlandschbestuur telah meminggirkan birokrasi Kasunanan, sehingga birokrasi itu hanya mengurus sistem administrasi setempat. (3) Tanah *lungguh* milik keraton yang tidak terkena program tanam paksa dijadikan perkebunan tanaman ekspor, sehingga daerah kekuasaan raja menyempit. (4) Melarang elit istana terjun dalam kegiatan politik.

Politik pengurangan yang berlangsung dalam kurun waktu panjang berakibat aristokrat Jawa terpilah menjadi dua kelompok, yakni aristokrat protagonis dan aristokrat status quo. Keterpilahan menimbulkan perbedaan sikap dan orientasi politik. Aristokrat protagonis mendukung politik pergerakan kebangsaan. Mereka membangun jejaring politik dengan ulama, intelektual, serta pengusaha dan pedagang Muslim. Aristokrat status quo bersikap sebaliknya, yaitu memungsikan diri sebagai 'garda depan' mendukung eksistensi pemerintah kolonial di Hindia Belanda.

Salah satu tindakan PB X melawan politik pengurangan adalah melalui kunjungan ke berbagai daerah. Kunjungan itu dinamakan perjalanan *incognito*. Bahasa istana menyebut *udik-udik* dan *tetirah*. Perjalanan *incognito* dibalut dengan pemberian bantuan, cinderamata, dan gelar kerajaan kepada tokoh masyarakat serta tokoh politik, bahkan Sunan menginap di daerah itu untuk menghormati pejabat setempat. Menurut Kuntowijoyo, perjalanan *incognito* adalah bagian dari politik simbolis, karena politik yang dimainkan PB X sejak tahun 1910 [*sic.*] bermakna sosial serta menggugah nasionalisme Jawa. Karena itu, Sunan lebih piawai dalam memainkan politik simbolis dari pada Residen Surakarta.

Perjalanan *incognito* mengandung unsur penyamaran dan bernuansa politis ditujukan untuk menampilkan kebesaran PB X sebagai raja Jawa. Daerah yang pernah dikunjungi adalah: Yogyakarta, Magelang, Temanggung, Purbalingga, Ambarawa, Salatiga, Semarang, Demak, Pekalongan, Kutoarjo, Cepu, Maos,

Cilacap, Banyumas, Purwokerto, Madiun, Kediri, Surabaya, Gresik, Pasuruan, Madura, Malang, Tasikmalaya, Garut, Bandung, Batavia, Banten, Bogor, Lampung-Sumatera Selatan, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Banyaknya tempat yang dikunjungi dan dalam konteks sistem *beamtenstaat* dan sistem *dactyloscopy* (sidik jari) yang merupakan teropong pemerintah Belanda yang ditujukan untuk mengawasi gerak gerik orang yang dicurigai, maka perjalanan *incognito* mencitrakan raja yang memiliki kebebasan dan kemandirian. Berpijak pada sistem *beamtenstaat* dan sistem *dactyloscopy* maka perjalanan dengan rombongan besar dapat mengganggu ketertiban dan keamanan. Kedatangan Sunan di suatu daerah dapat memacu kerumunan massa, karena adanya keinginan masyarakat untuk melihat rombongan itu. Munculnya kerumunan massa memungkinkan tumbuhnya 'dialog' antar orang yang berkerumun. Dalam perspektif pemikiran Islam kerumunan massa merefleksikan kebebasan yang seharusnya dimiliki setiap warga masyarakat. Mereka mulai memikirkan tentang *self-reliance* (kemandirian), *self-sufficiency* (swa-sembada), *self defence* (swa-pertahanan), serta kreativitas masyarakat Islam dalam usaha dan perdagangan.

Beamtenstaat dan *dactyloscopy* bila ditempatkan pada pemikiran Vilfredo Pareto menunjukkan bahwa Belanda tidak mampu menahan gerakan politik keagamaan meskipun telah dilakukan pengawasan secara ketat, baik tingkat lokal maupun pusat. Pada dasarnya gerakan politik keagamaan meningkatkan kualitas politik Muslim, karena memacu mereka berkomunikasi menghadapi kenyataan sosial-ekonomi maupun sosial-politik. Komunikasi dan tukar pikiran adalah pencerahan yang mereproduksi *self-image* (citra diri), dan membuka cakrawala *nahḍah* (kebangkitan) untuk

menghadapi kolonialisme Belanda yang memicu terjadinya kemiskinan struktural.

Berpijak dari kasus perjalanan *incognito* secara simbolik terkandung keinginan menyatukan kelas sosial yang ada dalam kerumunan menjadi sebuah kekuatan politik berbingkai SI dan BO. Tindakan ini yang paling rasional yang dapat dicapai, karena PB X mustahil menjadi pengurus ataupun anggota organisasi politik. Rupanya masyarakat paternalistik selalu mengikuti bingkai orientasi politik patron (raja). Artinya, citra politik patron dapat memacu rakyat untuk mengikuti orientasi-orientasi politik tersebut.

Tidak mengherankan bila perjalanan ke daerah-daerah menimbulkan ketegangan antara PB X dan pejabat Belanda di Surakarta. Pada masa Residen W. de Vogel (1897-1905), perjalanan Sunan ke Semarang diizinkan membawa rombongan sekitar 200 orang. Sebaliknya, pada masa Residen G.F. van Wijk (1909-1914) rombongan dibatasi 36 orang, dan kunjungan ke Buitenzorg [Bogor] pada tahun 1922 diperkecil lagi menjadi 15 orang.

Pengurangan jumlah rombongan merupakan strategi kolonial untuk menjaga sistem *beamtenstaat* yang *apolitik*. Maksudnya, Belanda tidak ingin muncul kekuatan politik dalam masyarakat. Perjalanan *incognito* dalam jumlah besar, dipersepsikan akan memacu terbentuknya kelompok politik, serta tumbuhnya ruang 'dialog politik' dalam masyarakat yang terfokus pada persoalan sosial-ekonomi serta sosial-politik. Kekhawatiran itu yang mendorong pemerintah membatasi jumlah perjalanan dan jumlah anggota rombongan.

B. Hilangnya Arah Politik Elit Kasunanan

Gejala disorientasi politik di istana sudah tampak sejak kesehatan PB X merosot. Putera mahkota sepulang dari pengasingan tidak lagi terjun dalam bidang politik. Pada sisi lain, PB X sejak berusia 32 tahun sudah mengidap penyakit ginjal, dan tidak berusaha

menekuni hidup sehat, sehingga penyakit yang diidapnya makin menggerogoti organ tubuhnya. Menginjak usia 70 tahun, Sunan tidak melakukan kegiatan politik. Dia dalam perawatan dokter pribadi R. Moehammad Saleh, serta dokter-dokter Belanda, Prof. Dr. Siegenbeek van Heukelom, dan Dr. Block di pesanggrahan Paras, Boyolali, hingga wafat pada tanggal 20 Februari 1939, jam 07.30.

Ada tiga persoalan yang memacu disorientasi politik, yakni:

- (1) Sejak tahun 1936 kesehatan Sunan makin menurun, tekanan kolonial dan kaum nasionalis garis keras menyudutkan peran politik elit istana, sehingga faksi P. Hangabehi cenderung berpihak ataupun berlindung dibalik kekuatan kolonial Belanda.
- (2) P. Hangabehi (putra mahkota), tidak memiliki visi dan misi politik. Keterlibatan P. Hangabehi dalam dunia politik hanya didorong oleh P. Hadiwidjojo dan RMA. Woerjaningrat. Persepsi Residen A.J.W. Harloff (1918-1922) bahwa putera mahkota adalah sosok aristokrat yang tidak mempunyai visi politik. Pemikiran ini selaras dengan pandangan Hoesein Djajadiningrat, bahwa hampir semua elit istana tidak memiliki visi dan misi politik, kecuali Koesoemojoedo dan Soerjohamidjojo yang memahami politik lokal Surakarta.

Keterlibatan Koesoemojoedo, Soerjohamidjojo, dan Woerjaningrat [menantu Sunan] memacu Residen Harloff melakukan tindakan provokatif. Mereka dituduh melakukan gerakan melawan pemerintah kolonial. Kepiawaian mereka memaksa pemerintah memilih P. Hangabehi sebagai putera mahkota, yang sama sekali tidak memiliki visi, dan hanya patuh, tunduk, dan berserah diri kepada pemerintah kolonial.

Menurut Larson, sejak semula PB X tidak menhendaki pengangkatan P. Hangabehi sebagai putera mahkota, dan lebih memilih Koesoemojoedo. Pada sisi lain, Van Wijk dan Sollewijn Gelpke melihat Koesoemojoedo sulit dipahami, dan pemikiran

politiknya berpaham sosialisme. Kepiawaian Koesoemojoedo dalam bidang politik menumbuhkan rasa tertarik Sunan kepada Koesoemojoedo. Perhatian ini justru memicu persaingan internal dan friksi politik di dalam istana yang mempengaruhi perkembangan politik lokal Surakarta.

Sementara itu, ikatan dan sinergi politik yang dirintis Sunan menjadi tidak berarti, karena persaingan antar elit istana memacu timbulnya faksi-faksi yang melemahkan peran politik Kasunanan. Menurut Clifford Geertz munculnya faksi politik merupakan kendala serius terhadap politik sipil yang diproyeksikan untuk meraih 'kesepadanan' antara pribumi dan bangsa Barat [Belanda].

- (3) Pada 1915, Residen F.P. Sollewijn Gelpke memutuskan menunjuk RA. Djojonagoro sebagai patih menggantikan RAA. Sosrodiningrat (1889-1915). Sebelum menduduki jabatan patih, RAA. Djojonagoro adalah Bupati *Nayoko*, dan dia adalah putera patih RAA. Sosrodiningrat. Penunjukan secara sepihak menimbulkan ketidakpuasan kerabat istana, karena peran Djojonagoro tidak sebanding Koesoemojoedo, Soerjohamidjojo dan Woerjaningrat. Mereka bertiga sangat aktif dalam politik pergerakan, sebaliknya pejabat Belanda memandang mereka adalah sosok yang licik dan berambisi.

Penunjukan Djojonagoro memungkinkan pemerintah melanjutkan praktek politik yang menempatkan birokrasi kepatihan dalam bayang-bayang kolonial, dan praktek semacam ini mempermudah pemerintah kolonial melakukan pengawasan terhadap gerakan perlawanan. Pada sisi lain, Larson berpendapat bahwa pejabat kepatihan yang dipilih pemerintah adalah pejabat berkepribadian lemah yang diharapkan akan menjembatani kepentingan kolonial, dan mengabaikan kepentingan keraton maupun rakyat.

Sementara itu pendirian madrasah dan sekolah umum, pembangunan pasar, perbankan, dan rumah sakit adalah sinergi asosiasi antara PB X dan ulama, intelektual, maupun pelaku ekonomi. Sinergi itu tidak untuk mengembalikan kekuasaan geopolitik, tetapi berusaha merekonstruksi 'batin' kemanusiaan untuk memacu mobilitas masyarakat. Sinergi antar mereka secara struktural membuka peluang politik, dan pada sisi lain menjadi tindakan dekonstruksi terhadap paradigma tradisional yang dianut, sekaligus memacu tumbuhnya politik partisipasi massa.

Pendirian madrasah dan sekolah umum juga mendorong perkuatan nilai keislaman yang pada dekade berikutnya menjadi landasan orientasi politik. Mereka menarik legitimasi politik yang pernah dilakukan, dan secara terbuka melakukan gerakan perlawanan. Pemberdayaan kelas menengah dan bawah dalam bidang pendidikan dan ketrampilan-ketrampilan yang berkaitan dengan peningkatan kehidupan masyarakat berimbas pada pemberian legitimasi terhadap elit istana yang berkorporasi dalam masyarakat. Peluang-peluang yang dibangkitkan Sunan adalah bersinggungan dengan kebijakan etis dan Undang-Undang Desentralisasi 1903. Kebijakan kolonial itu merupakan struktur yuridis yang terbuka terhadap peluang politik. Dengan demikian peluang-peluang yang dibangkitkan Sunan memacu tumbuhnya struktur peluang ekonomi dan peluang politik, serta tumbuhnya persinggungan politik dengan pemerintah kolonial. Tahap akhir ini tumbuh tuntutan kesepadanan politik dalam masyarakat.

Perubahan tragis terjadi setelah PB X wafat, karena penggantinya (PB XI dan PB XII) tidak mampu melanjutkan struktur peluang politik maupun ekonomi. PB XI (1939-1944) lebih suka menahan diri, dan tunduk kepada tentara pendudukan Jepang. Sementara itu, PB XII (1944-2005) terperosok pada kesalahan diplomasi sepanjang revolusi kemerdekaan. Kedua raja tidak mampu

melakukan sinergi asosiasi, sehingga muncul kemacetan kesinambungan politik antar elit istana dan tokoh politik pergerakan kebangsaan. Agaknya, visi politik PB XII adalah semu dan sesaat, serta tidak berusaha menciptakan keselarasan politik. Dalam sejarah politik Keraton Surakarta hanya beberapa raja yang mampu memperjuangkan substansi Islam yang berkaitan dengan pemberdayaan budaya, ekonomi, pendidikan, dan politik.

Sistem politik Hindia Belanda, yang supra sistemnya berada di tangan *Binnenlandsbestuur* dan *Inlandschbestuur* maka struktur ketatanegaraan ini memandulkan eksistensi politik kerajaan. Dengan adanya struktur ketatanegaraan ini, tentunya, kebijakan raja dalam bidang politik dan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kehidupan rakyat, meskipun kebijakan istana itu menciderai hati rakyat. Dalam konteks struktur ketatanegaraan di atas, rakyat tidak dapat menjatuhkan kekuasaan raja, sebaliknya rakyat harus menarik legitimasi politik mereka yang pernah disalurkan kepada pemerintah Belanda, karena pemerintah kolonial yang mengelola sistem politik dan ekonomi di Hindia Belanda. Penarikan legitimasi politik adalah kewajiban setiap Muslim untuk menegakkan kehormatan dan harga diri, mendorong kemandirian (*self-reliance*), swasembada (*self-sufficiency*), dan mempertahankan diri (*self-defence*).

Pemikiran politik PB XI dan PB XII justru menimbulkan sinergi negatif dengan tokoh pergerakan kebangsaan, baik di dalam istana maupun di luar istana. Keterlibatan putera dan menantu PB X dalam politik pergerakan, yakni Koesoemojoedo, Soerjomihardjo, dan Woerjaningrat merupakan kegiatan pribadi. Ketiga aristokrat itu sangat aktif dalam organisasi politik, yakni SI, BO, Politiek Economische Bond (PEB), Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI), Jong Java, Persatuan Bangsa Indonesia (PBI), dan Partai Indonesia Raya (Parindra).

Kegiatan politik ketiga aristokrat itu tidak dapat dipandang mewakili institusi Keraton Surakarta. Indikasi ini menunjukkan kemunduran, karena: (1) Pergantian kekuasaan tidak sinergis dengan paradigma politik partisipasi massa. Penguasa baru bertahan pada paradigma politik tradisional, dan menghendaki eksistensi kolonial dalam perjalanan politik bangsa. (2) Kembali pada paradigma politik tradisional mengakibatkan kekuasaan Sunan bersifat semu dan sesaat, serta tidak menciptakan keselarasan politik. (3) Kegiatan politik Koesoemojoedo, Soerjomihadjo, dan Woerjaningrat bersifat pribadi, dan bukan institusi. (4) Meskipun demikian ketiga aristokrat itu berperan aktif dalam organisasi politik pergerakan, tetapi tetap tidak akan mengubah sikap dan orientasi politik Sunan PB XI dan PB XII. Pemikiran politik PB XI dan PB XII berbanding terbalik dengan pemikiran politik Hamengku Buwana (HB) IX dalam menghadapi kolonial Belanda.

Berdasarkan hasil penelitian ini di atas dapat diajukan rekomendasi sebagai berikut:

1. Penggalan peristiwa-peristiwa lokal sejarah Indonesia harus didorong terus menerus, karena peristiwa lokal yang memacu tumbuhnya peristiwa nasional.
2. Konstruksi sejarah Indonesia yang disajikan dalam buku-buku teks sejarah berpusat pada penampilan peristiwa nasional, dan belum menempatkan peristiwa lokal menjadi muatan lokal pembelajaran sejarah. Pengungkapan peristiwa lokal yang berjaln dengan peristiwa nasional membangkitkan kesadaran dan kearifan bahwa kawasan lokal itu berperan dalam proses kemerdekaan bangsa.
3. Kajian-kajian mengenai sejarah Islam di Indonesia perlu dikembangkan secara mendalam, karena sumber-sumber berbahasa lokal dan asing sangat kaya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

:
Nama dan gelar : Drs. Hermanu Joebagio, M.Pd.
NIP : 19560303 198603 1001
Tempat & Tgl. Lahir : Madiun, 03 Maret 1956
Jenis Kelamin : Laki-laki
Lembaga/tempat kerja : Prodi Pendidikan Sejarah, FKIP UNS
Pangkat/golongan : Pembina / IV-a
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Alamat Kerja : Prodi Pendidikan Sejarah, FKIP UNS
Jl. Ir. Sutami No. 36 A, Kertaningan-
Surakarta 57126
Alamat Rumah : Jalan Merbabu III/ No.7 A, Bibis Luhur
RT 05/RW 21 Surakarta 57135,
Telp. 0271-853141, HP. 08122600039
Email : hermanu_joebagio@yahoo.com

2. RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Jenjang	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Bidang Studi
1983	S1	IKIP Yogyakarta	Pendidikan Sejarah
1995	S2	IKIP Jakarta / KPK UNS	Pendidikan Sejarah
	S3	UIN Sunan Kalijaga	Islamic Studies

3. PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Pelatihan	Penyelenggara
1998	Penataran Classroom Action Research	Secondary School Teacher Development Project, Ditjen Dikti
2003	Training of Trainers Metodologi Penelitian	DP3M, Ditjen Dikti
2005	Penulisan Artikel Ilmiah	LPPM Universitas Sebelas Maret

2006	Validator Uji-Coba Instrumen Sertifikasi Guru Pemula Kloning A', B', C' (Mapel Sejarah SMP dan SMA).	Ditjen Dikti, Direktorat Ketenagaan.
2007	Penilai Buku Teks Sejarah SMA, MA dan SMK	BSNP Depdiknas
2008	Penilai Buku Teks IPS SD, SMP dan MTs	BSNP Depdiknas
2008	Pelatihan dan Pedampingan Penyusunan Proposal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif	FKIP UNS
2009	Evaluasi Kurikulum dan Model Pembelajaran Inovatif	FKIP Universitas Sebelas Maret
2009	Blog dan e-learning	FKIP Universitas Sebelas Maret
2009	Training of Trainers Penelitian Tindakan Kelas	FKIP Universitas Sebelas Maret

4. PENGALAMAN JABATAN

Jabatan	Institusi	Tahun ... s.d ...
Sekretaris Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan PIPS	FKIP Universitas Sebelas Maret	1995 s.d. 1998
Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan PIPS	FKIP Universitas Sebelas Maret	1998 s.d. 2002

5. PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Jabatan	Sumber Dana
2004	Pengembangan Model Manajemen Kurikulum	Ketua	Proyek Peningkatan

	IPS Inovatif di SLTPN 4, Surakarta		Kualitas SDM Ditjen Dikti.
2007	Babad Prayut: Analisis Psikologi dan Jaringan Politik Abad XVIII	Ketua	DIPA PNBN FKIP UNS
2009	Model Revitalisasi Manuskrip Jawa dengan Pendekatan Burhani untuk Mendukung Pembelajaran Sejarah Indonesia	Ketua	DIPA PNBP FKIP UNS
2010	Biografi Politik Paku Buwana X: Gerakan Islam dan Kebangsaan di Keraton Surakarta (Disertasi)	Ketua	DISERTASI
2010	Pengembangan Kurikulum Berbasis Kearifan Lokal Melalui Model <i>Problem Base Learning</i> Bermedia untuk Meningkatkan <i>Eloquentia Historis</i>	Ketua	DIPA PNBP FKIP UNS

6. KARYA TULIS ILMIAH

A. Buku/Bab/Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit/ Jurnal
2005	"Paku Buwana X: Meniti Kebesaran Berteraskan Wahyu", dalam Leo Agung S & Hermanu Joebagio (ed.), <i>Kajian Sejarah Mikro Sebagai Muatan Lokal</i> .	Sebelas Maret University Press.
2005	Politik Pendidikan Islam Paku	<i>Millah</i> , Jurnal Studi

	Buwana X	Agama UII Yogyakarta, Terakreditasi, Vol. V, No. 1, Agustus 2005.
2005	Merancang Sejarah yang Multikulturalis dalam Kurikulum 2004	<i>Cakrawala Pendidikan</i> , Jurnal Ilmiah Pendidikan UNY, Terakreditasi, No. 3, November 2005.
2008	Jatuhnya Elit Keraton dalam Politik Pergerakan	<i>Mozaik</i> , Jurnal Ilmu Humaniora Unair, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2008.
2008	Gerakan Sempalan Agama dalam Perspektif Sejarah	<i>Millah</i> , Jurnal Studi Agama UII Yogyakarta, Terakreditasi, Vol. VII, No. 2, Februari 08.
2008	Babad Prayut: Analisis Psikologi dan Jaringan Politik Abad Ke-18	<i>MIIPS</i> , Majalah Ilmiah Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP UNS, Vol. 7, No.2, September 2008.
2009	B.R.M.G. Sayidin Malikul Kusno: Pelopor Pendidikan Masyarakat	<i>Cakrawala Pendidikan</i> , Jurnal Ilmiah Pendidikan UNY, No.1, Februari 2009.
2009	Islamic Political Thought of Paku Buwana IV	<i>Millah</i> , Jurnal Studi Agama UII Yogyakarta, Terakreditasi, Vol. IX, No. 2, Februari 2009.
2009	Tata Kota dan Solo Kota Budaya Ditinjau dari Perspektif Sejarah	<i>Motivasi</i> , Majalah FKIP-UNS, Edisi XXXVI, September 2009
2010	Javanese Manuscript and Teaching History in Higher Education	Proceeding International Seminar, Instructional Strategy in Higher Education, Saturday, 27 th March 2010, Sahid Jaya,

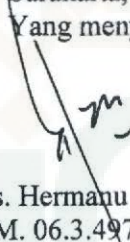
--	--	--

7. ORGANISASI PROFESI ILMIAH

Tahun	Organisasi	Jabatan
2002	Majalah Ilmiah Ilmu Pengetahuan Sosial (MIIPS)	Wakil Pemimpin Redaksi
2009	Majalah Ilmiah Ilmu Pengetahuan Sosial (MIIPS)	Pemimpin Redaksi
2010	Candi, Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah	Pemimpin Redaksi

Saya menyatakan bahwa semua keterangan yang tertera dalam daftar riwayat hidup ini adalah benar, dan apabila terdapat kesalahan saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Surakarta, 14 Juni 2010
Yang menyatakan,


Drs. Hermanu Joebagio, M.Pd.
NIM. 06.3.497-BR

